

Online Media Framing of Military Education Policies for Problem Students: Analysis of Detik.com and Kompas.com

Framing Media Online terhadap Kebijakan Pendidikan Militer untuk Siswa Bermasalah: Analisis Detik.com dan Kompas.com

Amelya Agustini, Azzahra Raya Alifa, Firdaus Yunidharta.

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

e-mail: 2310631190006@student.unsika.ac.id, 2310631190011@student.unsika.ac.id,
firdaus.yunidharta@fisip.unsika.ac.id

Article Info

Article history:

Submitted

October 31, 2025

Revised

January 14, 2026

Accepted

January 14, 2026

Abstract

In recent months, precisely in early April – August 2025, the media in Indonesia has been enlivened with news about the new policy issued by the Governor of West Java Dedi Mulyadi, regarding the policy of sending problematic students to military barracks, the pros and cons also occur that some parties support this policy as an effort to teach discipline and character building, but not with other parties who actually reject this policy because they think it is unfriendly for children and consequent violation of human rights. This study uses a descriptive qualitative method with Robert N. Entman's framing analysis model. With four elements of analysis to see how the media frames the issue well. The media objects studied focus on Detik.com and Kompas.com because both show the news of this topic. This difference in framing highlights how the media can influence the way the public understands a policy through the topic of a particular issue.

Keywords: *Framing Analysis Robert n entman, online media, Dedi Mulyadi, military education*

Abstrak

Pada beberapa bulan belakangan ini tepatnya awal april – agustus 2025 media di Indonesia diramaikan dengan pemberitaan mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terhadap kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, Pro kontra pun terjadi sebagian pihak mendukung kebijakan ini sebagai upaya pengajaran disiplin dan pembentukan karakter, tetapi tidak dengan pihak lain yang justru menolak adanya kebijakan ini karena mereka beranggapan tidak ramah untuk anak dan berakibat melanggar hak asasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model analisis framing Robert N. Entman. Dengan empat elemen analisis untuk melihat bagaimana media membingkai isu tersebut dengan baik. Objek media yang diteliti memfokuskan pada Detik.com dan Kompas.com karena keduanya menunjukkan pemberitaan topik ini. Perbedaan framing ini menonjolkan bagaimana media dapat mempengaruhi cara publik memahami sebuah kebijakan melalui topik isu tertentu.

Kata Kunci: *Analisis Framing Robert n entman, media online, Dedi Mulyadi, pendidikan militer*

PENDAHULUAN

Perkembangan media teknologi saat ini sangat berguna sekali untuk menyebarkan infomasi yang secara menyeluruh kepada masyarakat luas. Realita berita yang awalnya tertutup dan terbatas kini berubah menjadi terbuka dan cakupannya sangat luas. Sehingga masyarakat terbantu untuk mengakses dan mencari segala informasi yang dibutuhkan dengan baik, dengan mengikuti tren tersebut industri media massa mendapatkan peluang yang bagus dalam menghadirkan informasi. Media massa juga ialah saluran komunikasi yang sangat luas dan beguna, banyak sekali berita atau peristiwa penting yang tidak luput dari pemberitaan media massa. Media massa juga hadir untuk mengamati, mencatat dan merekam dan kemudia hasil dari berita tersebut disebarluaskan ke khalayak publik dengan frame atau sudut pandang tertentu ([H.V Ayomi, 2021](#)).

Sebuah media online juga menyajikan beritanya melalui caranya sendiri, dengan menyangkut-pautkan netralitas dan obyektifitas media ketika ingin melaporkan sebuah peristiwa. Setiap wartawan juga mempunyai latar belakang dan berbagai faktor etika ketika ingin bertindak dan memilih informasi untuk dilaporkan ke public ([Suprobo et al., 2016](#)). Sedangkan pendidikan merupakan proses seseorang untuk mencari pengetahuan dan keahlian mereka, serta membangun karakter setiap individu. Namun pendidikan di Indonesia saat ini masih banyak menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku siswa.

Salah satu fenomena kenakalan remaja yang sering terjadi seperti tawuran antar pelajar, bolos sekolah hingga melanggar tata tertib yang ada di sekolah, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba masalah ini menjadi sorotan berbagai pihak dan masalah yang sangat serius. Remaja adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan menuju dewasa dan berusaha menemukan identitas diri melalui interaksi dengan teman sebaya yang memiliki karakter atau minat yang serupa. ([Adillah et al., 2024](#)) Namun, banyak remaja yang terperosok dalam pergaulan yang tidak sehat, termasuk bergabung dengan kelompok gangster dan mengadopsi perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Melalui Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2024 mencapai 240 kasus kekerasan yang diakibatkan oleh penganiayaan atau perkelahian, kekerasan psikis, korban tawuran, sampai yang terparah korban pembunuhan ([Firdausya, 2025](#)).

Penyebab utama yang terjadi biasanya karena kurangnya pendekatan dengan orang tua dan anak menjadi sulit terbuka kepada orang tua. Hal ini mengakibatkan pengawasan orang tua kepada sang anak menjadi lemah. Sebagai cara mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah maupun pemerintahan daerah sudah banyak mencoba berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang kemudian menimbulkan konflik publik adalah program kerja dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sangat kontroversial dan menarik perhatian publik yaitu mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter dan pengembangan diri. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan prilaku siswa melalui kedisiplinan yang lebih tegas dan belajar lebih bertanggung jawab, tetapi bukan sebagai bentuk hukuman, untuk membentuk ulang karakter para pelajar ([Maya Citra, 2025](#)).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, program ini dibuat untuk dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu yang beragam, mulai dari sekitar sepuluh sampai empat belas hari, dan bisa diperpanjang hingga enam bulan. Dalam waktu tersebut, peserta tidak terlibat dalam kegiatan belajar formal di sekolah. Selama proses pembinaan berlangsung, terdapat siswa merasa terasing dari lingkungan sekolah formal. Situasi ini mencerminkan adanya dedikasi untuk fokus

pada proses pengembangan dan pemulihan karakter bagi siswa yang terlibat dalam perilaku nakal. Aktivitas pengembangan di barak militer tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki perilaku negatif, tetapi juga bertujuan untuk mananamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab, yang diharapkan dapat memfasilitasi perubahan perilaku siswa secara keseluruhan ([Sumaryanto & Ibrahim, 2022](#)).

Program ini ditujukan untuk siswa yang memiliki tingkah laku yang menyimpang, seperti terlibat dalam kerusuhan, bolos sekolah, serta penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Target utama adalah mereka yang sulit untuk dibimbing oleh pihak sekolah atau keluarga, dengan proses penentuan peserta dilakukan melalui kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Namun, dilain hal kebijakan ini memicu beragam komentar pro dan kontra dari masyarakat berbagai pihak. Ada yang menilai program ini efektif, bahkan sejumlah orang tua mengaku anak mereka menunjukkan perubahan positif setelah mengikuti pendidikan di barak, seperti menjadi lebih terarah, merasa dihargai, serta memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang purnawirawan TNI yang menilai pengalaman pendidikan di barak mampu membentuk karakter disiplin, sehingga peserta didik yang sebelumnya dikenal bermasalah dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ([Fahruzy et al., 2025](#)).

Namun, di sisi lain kebijakan ini juga menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Menurut Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung pada wawancara nya dengan kompas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dinilai sebagai bentuk kebijakan putus asa.

“Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu,” ([Maharani, 2025](#)).

Sementara itu, dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menganggap bahwa program pengiriman siswa ke barak militer memiliki sejumlah masalah karena tidak melibatkan asesmen psikolog profesional, dan hanya berlandaskan pada rekomendasi dari guru bimbingan konseling (BK). Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, menambahkan bahwa ada situasi di mana siswa diancam akan tidak naik kelas jika mereka menolak untuk ikut serta. KPAI juga menekankan kemungkinan pelanggaran hak anak, mengingat beberapa siswa bahkan tidak mengerti mengapa mereka dipilih untuk mengikuti program ini. ([Maharani, 2025](#)) Kebijakan yang mengarahkan siswa dengan perilaku yang menyimpang krpada lembaga militer menunjukkan jika terdapat kecenderungan pada pola kedisiplinan yang represif dan reaktif dalam lingkup pendidikan. Alih – alih mendapatkan pendampingan yang menyeluruh bagi siswa-siswi kebijakan ini justru memperkuat praktik eksklusi sosial yang saling bertolak belakang dengan keadilan pendidikan. Masalah tersebut malah menunjukkan keterbatasan negara dalam memahamai poin persoalan siswa secara menyeluruh ([Mohammad Fahmi Sepudin, 2025](#)).

Oleh karena itu evaluasi sangatlah penting untuk kebijakan ini, karna bukan nya siswa yang merasakan dampak nya tapi juga para guru, keluarga, serta masyarakat. Bagi para pelajar, program kebijakan seperti ini bisa sangat berpotensi untuk membentuk sifat mereka, tetapi juga bisa sangat beresiko merusak kesehatan mental mereka jika cara yang digunakan tidak sesuai. Guru pun juga mengalami kesulitan untuk memberikan pendidikan nilai yang humanis ditengah metode disiplin yang ketat. Di sisi lain, bagi masyarakat kebijakan ini bisa dipandang sebagai cara untuk mengatasi perilaku nakal di kalangan remaja, meskipun masih ada rasa khawatir tersendiri ([M. Mahbubi, 2025](#)).

Untuk penelitian ini, peneliti berminat untuk mengkaji pemberitaan dari dua

platform berita online, yaitu Detik.com dan Kompas.com. Detik.com telah diakui sebagai salah satu situs berita online terbesar dan tercepat di tanah air sejak didirikan pada tahun 1998. Situs ini mempunyai reputasi sebagai media yang menyajikan informasi dengan akurat dan faktual, menggunakan gaya penulisan yang jelas serta mudah dicerna oleh para pembacanya. Detik.com sering kali mengangkat tema-tema terkait sosial, politik, dan pemerintahan dengan pendekatan yang informatif serta responsif terhadap perubahan dalam masyarakat.

Dalam konteks kebijakan pemindahan siswa bermasalah ke barak militer yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Detik.com berfungsi untuk menyoroti perspektif pemerintah serta tanggapan yang muncul dari berbagai pihak, termasuk para ahli pendidikan dan instansi pemerintah. Gaya laporan Detik.com lebih banyak menekankan pada sisi informatif, fokus pada aspek kebijakan beserta dampaknya bagi publik, meskipun tetap memberikan kesempatan bagi pendapat kritis yang muncul di masyarakat.

Dengan kecepatan dalam publikasi dan kelengkapan informasi, Detik.com telah menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat dalam memahami isu-isu terkini di Indonesia. Sementara itu, Kompas.com, yang merupakan bagian dari jaringan media Kompas Gramedia, diakui sebagai platform berita digital yang menekankan prinsip jurnalisme yang mendalam dan seimbang.

Kompas.com memiliki sejarah panjang yang mengedepankan akurasi, kepercayaan, serta keadilan dalam menyampaikan berita. Dalam laporan mengenai kebijakan pendidikan militer untuk siswa bermasalah, Kompas.com lebih menonjolkan sudut pandang pro dan kontra yang ada di masyarakat, serta memberikan ruang yang luas untuk perspektif dari lembaga perlindungan anak seperti KPAI, Komnas HAM, hingga figur publik seperti Kak Seto dan Natalius Pigai. Dengan pendekatan jurnalistik yang analitis dan seimbang, Kompas.com tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mendorong pembaca untuk mempertimbangkan isu secara kritis dan reflektif ([Fadil Muhamarr et al., 2025](#)).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing untuk memahami bagaimana media online membungkai kebijakan pendidikan militer bagi siswa bermasalah. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah bagaimana kita memahami fenomena yang dialami secara keseluruhan dengan cara deskripsi dan menyajikan dalam bentuk kata serta bahasa, pada konteks tertentu dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris, serta menyajikan gambaran tentang konteks, situasi, dan kejadian, fenomena dari apa yang diteliti ([Rieka, 2020](#)).

Pada penelitian ini mengambil subjek media online di Indonesia dalam portal berita Detik.com dan Kompas. Com mengenai kebijakan pendidikan militer untuk siswa bermasalah selama periode waktu 06 Mei – 24 Mei 2025. Dalam penelitian ini data yang akan disajikan dalam bentuk tabel yang diperoleh dari hasil analisis berita dengan menggunakan model dari Robert Entman ([Suprobo et al., 2016](#)). Sumber data primer didapatkan dari pemberitaan detik.com dan kompas.com. Sedangkan data sekunder ialah beberapa literatur yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Berikut judul berita yang akan dianalisis oleh peneliti dari portal media detik.com dan kompas.com, yaitu:

Tabel 1. Data Berita yang akan Diteliti

Detik.com		Kompas.com	
Tanggal Terbit	Judul Berita	Tanggal Terbit	Judul Berita
	Respons Pakar		Kontroversi
06 Mei 2025	hingga KemenHAM soal Siswa 'Nakal'	13 Mei 2025	Program Barak Milter Dedi Mulyadi yang Berujung Dilaporkan ke Komnas HAM.
	Dikirim ke Barak TNI.		
21 Mei 2025	Siswa 'Nakal'	24 Mei 2025	Suara Pro-Kontra
	Dikirim ke Barak		Kebijakan Dedi
	Diharap Tak Pecah		Mulyadi Kirim
	Belah Masyarakat.		Siswa ke Barak Militer, Terbaru Ada dari Kak Seto

(sumber: Data Olahan Peneliti)

Penelitian ini menggunakan metode framing dengan berdasarkan model Robert N Entman. Model yang digunakan untuk menganalisa bagaimana suatu media membungkai sebuah isu peristiwa atau kebijakan tertentu agar menjadi pusat perhatian khalayak. Ia menjelaskan bahwa framing berita terutama dengan melibatkan seleksi dan makna penting dapat membuat informasi semakin menjadi sorotan publik ([Ambar, 2017](#)).

Model analisis framing Robert Entman terdapat 4 aspek yaitu define problems (pendefinisian masalah) menekankan bahwa bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, diagnose causes (memperkirakan atau sumber masalah) membungkai siapa penyebab dari permasalahan tersebut, make moral judgement (keputusan moral) memberikan argumentasi atau statement yang dapat mendukung penyebab suatu masalah, treatment recommendation (menekankan penyelesaian) memberikan kesimpulan terhadap solusi yang diinginkan wartawan dengan melihat siapa dan seperti apa peristiwa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Framing Pada Media Online Detik.com

Detik.com banyak mengangkat berita mengenai kebijakan gubernur dedi mulyadi terkait program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Pemberitaan mencakup berbagai aspek, mulai dari alasan terbentuk kebijakan tersebut hingga ke respons masyarakat dan lembaga negara terhadap implementasi terhadap program tersebut. Namun, dari banyaknya artikel berita yang dipublikasikan, peneliti memilih 2 dari 30 berita yang dianggap paling cocok untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2. Framing Media Online Detik.com

Elemen Framing Model (Robert Entman)	Judul Berita	
	"Respons Pakar hingga KemenHAM soal Siswa 'Nakal' Dikirim ke Barak TNI."	"Siswa 'Nakal' Dikirim ke Barak Diharap Tak Pecah Belah Masyarakat."
Define Problems	Media Online Detik.com memosisikan permasalahan tersebut sebagai perilaku menyimpang pelajar yang memerlukan penanganan khusus. Portal berita ini mengarahkan narasi melalui kutipan ahli bidang edukasi dan Kementerian Hukum dan HAM, yang menjelaskan bahwa sistem pembinaan ala kemiliteran merupakan solusi baik bagi peserta didik dengan tingkat kedisiplinan rendah. Konsekuensinya, pelajar dengan perilaku bermasalah dipandang sebagai sumber utama gangguan dalam stabilitas sistem pendidikan.	Media Detik justru mengonstruksikan masalah ini sebagai fenomena kemasyarakatan yang berkemampuan menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem sosial. Penekanan berita utama bukan terletak pada conduct siswa semata, melainkan pada implikasi kebijakan publik terhadap relasi antarwarga.
Diagnose Cause	Faktor penyebab permasalahan diidentifikasi terletak pada minimnya kontrol dan perhatian dari keluarga dan sekolah, ditambah dengan perilaku menyimpang para remaja. Detik.com menggarisbawahi	Penyebab kenakalan siswa dan kebijakan bergaya militeristik bukan hanya sebagai masalah personal melainkan juga akibat ketidakefektifan dari pendekatan humanis/lembut, tekanan

	bahwa pelajar yang mempunyai problematic behavior harus memerlukan "sentuhan tegas" yang sudah tidak bisa diatasi lagi oleh tenaga didik atau keluarga.	konteks sosial-politik, serta menurunya pendidikan religius dalam membangun kepribadian.
Make Moral Judgement	Narasi moral yang muncul adalah bahwa kebijakan ini dianggap solutif dan out of the box. Ada legitimasi moral bahwa tindakan pemerintah adalah sah dan bermanfaat bagi pembinaan karakter siswa.	Berita ini menilai kebijakan pengiriman siswa ke barak militer sebagai upaya dengan niat baik untuk membina kedisiplinan sekaligus menjaga persatuan masyarakat. Perbedaan pendapat diposisikan sebagai wajar, namun ditekankan agar tidak menjadi sumber perpecahan.
Treatment Recommendations	Solusi yang ditawarkan adalah melanjutkan program barak militer dengan evaluasi teknis. Kebijakan dipandang tidak hanya sebagai hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter disiplin.	Solusi yang ditawarkan adalah menyikapi pro-kontra secara bijak, memperkuat peran Madrasah Diniyah dalam pendidikan karakter, dan memastikan kebijakan tidak menimbulkan perpecahan sosial.

(sumber: Data Olahan Peneliti)

Pemberitaan Detik.com mengenai program kebijakan pengiriman siswa berprilaku menyimpang ke barak militer, dalam liputannya cenderung mengangkat aspek pembentukan disiplin dan pengembangan kepribadian. Permasalahan ini dijelaskan sebagai cara pemerintah lokal dalam menghadapi perilaku menyimpang remaja yang rumit dan diatasi melalui pendekatan konvesional.

Berdasarkan susunan analisis Robert N. Entman, terlihat bahwa Detik.com memakai pemilihan topik dengan mengutamakan endorsement fungsionaris,

sejumlah wali murid, dan akademisi, sekalian memberikan ruang terbatas untuk pandangan kritis. Penekanan pada aspek ini membentuk bingkai bahwa inisiatif militerisasi terhadap siswa yang bermasalah merupakan alternatif efektif walaupun masih banyak menuai pro-kontra.

Berikut pembahasan mengenai isu pendidikan militer untuk siswa bermasalah dalam media online Detik.com dalam periode waktu 06 Mei – 24 Mei 2025.

Analisis Media Online Respons Pakar hingga KemenHAM soal Siswa 'Nakal' Dikirim ke Barak TNI.

Define Problems dalam pemberitaan ini merujuk pada eksistensi problematika perilaku menyimpang pelajar di wilayah Jawa Barat yang dipersepsikan kompleks untuk diselesaikan oleh institusi pendidikan maupun lingkungan keluarga. Insiden seperti perkelahian antar pelajar, ketergantungan permainan digital, serta sikap tidak patuh siswa diposisikan sebagai persoalan krusial yang memerlukan tindakan intervensi spesifik. Inisiatif Gubernur Jawa Barat untuk merelokasi siswa bermasalah ke fasilitas TNI dipresentasikan sebagai respons terhadap problematika dimaksud. Dalam perspektif Detik.com, inti permasalahan bukan semata pada konduite siswa, melainkan juga pada urgensi akan sistem pembinaan yang lebih progresif dibandingkan metodologi tradisional di sekolah.

Diagnose Cause dalam berita ini mengarah pada asumsi bahwa metodologi pembinaan persuasif di lingkungan sekolah telah kehilangan efektivitasnya. Ahli pendidikan Cecep Darmawan mengindikasikan bahwa struktur kurikulum dan program sekolah tidak memadai untuk mengatasi siswa bermasalah, sehingga diperlukan pola pembinaan disiplin melalui fasilitas TNI. Lebih lanjut, KemenHAM Jawa Barat menyatakan persoalan delinkuensi remaja telah berlangsung kronis dan pemerintah pusat belum menghasilkan tindakan konkret, sehingga kebijakan ini muncul akibat kurangnya keseriusan administrasi sebelumnya dalam mengantisipasi isu kepemudaan. Faktor tambahan adalah keperluan legitimasi masyarakat, di mana persetujuan wali murid dijadikan prasyarat untuk meminimalisir tuduhan pelanggaran hak asasi.

Make Moral Judgement dari berita ini adalah evaluasi moral bahwa kebijakan fasilitas militer dapat dianggap tindakan konstruktif jika dijalankan dengan framing yang sesuai. Cecep Darmawan menyatakan pendidikan karakter via fasilitas militer adalah hal yang "*bagus menurut saya*" asal tidak dipersepsi sebagai dinas militer obligatori. KemenHAM juga menilai kebijakan ini valid secara moral dan legal bila ada persetujuan dari wali murid, sehingga tidak melanggar HAM.

Kritik yang muncul justru diarahkan pada aspek operasional, seperti belum jelasnya desain kurikulum dan jangka waktu program. Dengan demikian, frame moral dalam berita ini lebih banyak memberikan dukungan pada kebijakan pemerintah dengan catatan perlunya perbaikan operasional.

Treatment Recommendations dari berita ini adalah keperluan penyusunan kurikulum yang transparan, melibatkan stakeholder edukasi seperti psikolog klinis, guru pembimbing, hingga pemimpin spiritual, agar kebijakan tidak hanya dipahami sebagai bentuk militerisasi. Pakar juga menyarankan agar pemerintah mengintensifkan komunikasi publik supaya masyarakat tidak misunderstanding bahwa program ini adalah wajib militer. Selain itu, evaluasi periodik dan pendampingan pasca-program direkomendasikan agar dampak positifnya tidak hanya temporer. Melalui cara ini, kebijakan diharapkan tidak hanya menjadi "*hukuman*", tetapi juga bentuk pembinaan kepribadian berkelanjutan.

Analisis Media Online Siswa 'Nakal' Dikirim ke Barak Diharap Tak Pecah Belah Masyarakat.

Define Problems dari liputan ini berkenaan dengan adanya dikotomi masyarakat mengenai kebijakan penempatan siswa bermasalah ke kompleks militer yang dikhawatirkan dapat memicu perpecahan komunitas. Isu ini bukan hanya berkaitan dengan perilaku pelajar, tetapi juga bagaimana strategi tersebut menimbulkan polemik publik. Dalam framing Detik.com, masalah diposisikan pada dampak sosial dari kebijakan, yakni potensi perbedaan pandangan masyarakat yang bisa mengganggu kesejahteraan sosial.

Diagnose Cause dalam pemberitaan ini adalah asumsi bahwa kenakalan remaja merupakan gejala alamiah dalam dunia pendidikan, namun respons pemerintah memunculkan variasi sikap di masyarakat.

Ketidakjelasan dalam pendekatan yang digunakan antara yang menginginkan cara lebih persuasif (*soft approach*) dan yang mendukung langkah keras menjadikan kebijakan ini diperdebatkan. Dengan demikian, sumber masalah bukan hanya pada siswa, tetapi juga pada cara kebijakan tersebut terhadap pandangan publik.

Make Moral Judgement dari berita ini adalah evaluasi moral bahwa kebijakan tersebut muncul dari niat konstruktif untuk membina anak-anak, dan perbedaan pendapat harus dipahami sebagai hal yang wajar dalam masyarakat demokratis yang senang berpendapat. Ketua FKDT Garut, Atep Taofiq Muhtar, menegaskan bahwa baik yang pro maupun kontra sama-sama memiliki motivasi baik demi kebaikan pendidikan. Secara etis, berita ini memframing kebijakan bukan sebagai hukuman represif, melainkan sebagai upaya pembinaan yang harus dijalankan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Treatment Recommendations dari berita ini adalah ajakan untuk menyikapi perbedaan pandangan secara dewasa, memperluas peran Madrasah Diniyah sebagai poin utama pendidikan karakter, serta memastikan program kompleks militer berjalan tanpa memicu konflik sosial. Dengan metode ini, kebijakan diharapkan tetap dapat kerjakan, tetapi tidak menimbulkan perselisihan antar bagian masyarakat.

Analisis Framing Pada Media Online Kompas.com

Portal berita Kompas.com menandai secara luas kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait pengiriman siswa bermasalah ke komplek militer. Masalah tersebut diberitakan melalui berbagai sudut pandang, mulai dari tujuan kebijakan hingga tanggapan kritis maupun dukungan dari publik serta lembaga terkait. Dari total kurang lebih 45 artikel yang dipublikasikan, peneliti memilih 2 berita yang dinilai paling menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 3. Framing Media Online Kompas.com

Elemen Framing Model (Robert Entman)	Judul Berita	
	"Kontroversi Program Barak Milter Dedi Mulyadi yang Berujung Dilaporkan ke Komnas HAM"	"Suara Pro-Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Terbaru Ada dari Kak Seto"
Define Problems	<p>Program Kebijakan menempatkan pelajar bermasalah ke lingkup militer dipandang sebagai isu yang memunculkan perdebatan dan kontroversi, yang bukan hanya solusi penyadaran. Masalah pokok yang dinaikan adalah keupayaan violasi terhadap hak anak, pada akhirnya kebijakan ini menjadi prioritas utama perhatian publik dan berujung dilaporkan ke Komnas HAM.</p> <p>Polemik ini muncul karena strategi kebijakan disusun secara sebelah pihak tanpa melibatkan masyarakat atau pihak dari akademisi yang mempunyai. Serta tidak dilibatkan ahli – ahli yang memang dibutuhkan seperti psikolog, pembimbing, dan lembaga perlindungan anak, karna itu lah memicu</p>	<p>Pemberitaan tentang isu ini memframing permasalahan pada kebijakan mengenai pengiriman pelajar yang berperilaku menyimpang ke kompleks militer yang dibuat oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Isu tersebut memicu kontroversi publik, baik dalam dukungan maupun penolakan, terkait pada kemampuan, format pembangunan karakter, dan tindakan pelanggaran hak anak.</p> <p>Perdebatan terjadi karena tidak disertakan pertimbangan oleh ahli psikolog profesional dalam memastikan siswa yang dikirim ke barak militer, adanya ancaman tidak lolos kenaikan kelas jika siswa menolak nya, dan masalah pelanggaran hak asasi anak. Persepsi ini datang dari</p>

Diagnose Cause	penolakan dari berbagai pihak, Di samping itu pendekatan seperti ini tidak sesuai dengan konsep pendidikan inklusif.	KPAI dan Tamsil Linrung, yang mengevaluasi kebijakan ini menggambarkan ketidakberhasilan pemerintah menyiapkan perencanaan pembinaan yang manusiawi.
Make Moral Judgement	Kompas.com membingkai tindakan dari pemda mencerminkan kegagalan dan bermasalah karena lebih mengutamakan pendekatan kemiliteran, serta kebijakan ini dianggap tidak sejalan dan melanggar hak asasi anak.	Dari aspek moral, pemberitaan ini menyajikan dua pandangan: kelompok yang tidak setuju dan menganggap program ini bisa bertentangdengan konsep pendidikan global (KPAI, Tamsil), dan golongan yang lebih lagi mendukung program ini bahkan untuk direalisasikan secara nasional jika benar konstruktif (Kak Seto, Natalius Pigai).
	Alternatif yang diusulkan adalah mencoba untuk diadakan nya evaluasi kebijakan ini secara mendalam dan keseluruhan, dan juga mengikutsertakan ahli-ahli yang memang berkompeten dalam hal ini seperti pakar pendidikan, dan psikologi, serta memaksimalkan	Pemecahan yang diusulkan adalah review ekstensif terhadap program, dengan memperhatikan hasil dan meluruskan kelemahan yang ada. KPAI mengusulkan evaluasi ahli psikolog sebagai kewajiban utama sementara dukungan dari Kak Seto dab Natalius

Treatment	pendekatan rehabilitatif dan	Pigai mengusulkan agar
Recomendations	pengarahan konseling. Di samping itu Komnas HAM dan lembaga yang terkait diarahkan untuk melakukan pengendalian supaya kebijakan tetap konsisten dengan prinsip perlindungan anak.	program dikembangkan secara nasional jika terbukti sukses. Pilihan lain yang direkomendasikan adalah pengajaran berlandas pondok pesantren serta pengajaran berlandaskan kepatuhan persona dewasa.

(sumber: Data Olahan Peneliti)

Melalui reportase Kompas.com yang mengenai kebijakan pengiriman pelajar yang menyimpang ke barak militer diframing sebagai permasalahan publik yang penuh perdebatan. Media ini menyuguhkan dorongan pro dan kontra, berangkat dari dukungan seperti kak seto dan Natalius Pigai yang memandang program ini dapat melanggar hak asasi anak serta kurangnya pendekatan berbasis psikologis. Permasalahan ini bukan hanya diletakkan sebagai tujuan pengajaran, tetapi juga sebagai bacaan yang mengutik perihal hak asasi dan pendidikan nasional.

Dengan melalui susunan aspek Robert N. Entman, dapat dibaca bahwa Kompas.com berusaha memberikan ruang adil dari kedua sudut pandang. Persepsi dari berbagai suara yang dikeluarkan dapat membungkai bahwa program kebijakan ini masih bermasalah, dilihat dari kedua sisi yang berbeda cara pandangnya ada yang menyuarakan bahwa kebijakan ini sangat sesuai dan dapat menumbuhkan sikap kedisiplinan, namun justru satu sisi lainnya juga berstatment bahwa kebijakan ini ditakutkan menimbulkan permasalahan bagi perlindungan anak. Berikut pembahasan mengenai isu pendidikan militer untuk siswa bermasalah dalam media online Kompas.com dalam periode waktu 06 Mei – 24 Mei 2025.

Analisis Media Online Kontroversi Program Barak Milter Dedi Mulyadi yang Berujung Dilaporkan ke Komnas HAM

Define Problems, berita ini adalah menempatkan masalah pada kebijakan pengiriman terhadap siswa bermasalah ke barak militer yang menimbulkan kontroversi terhadap publik. Program ini bukan sekedar menjadi solusi untuk menjadi disiplin, tetapi juga menjadi persoalan karena dianggap melanggar hak anak. Hal yang menjadi sorotan utamanya adalah langkah komnas HAM yang menerima laporan terkait kebijakan ini, sehingga masalah ini didefinisikan sebagai isu hak asasi manusia, bukan sekadar pembinaan siswa.

Diagnose Causes, berita ini adalah penyebab kontroversi yang dijelaskan karena kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan pakar pendidikan, psikolog maupun lembaga perlindungan anak. Kajian akademik dan transparansi yang kurang memicu terjadinya resistensi masyarakat sipil. Faktor lainnya adalah pendekatan militeristik dipandang terlalu koersif dalam dunia pendidikan, sehingga menimbulkan laporan ke lembaga HAM.

Make Moral Judgement, berita ini adalah secara moral Kompas.com membuat

framing kebijakan ini sebagai langkah yang lemah karena secara etis menempatkan siswa yang bermasalah ke dalam lingkungan militer yang keras. Narasi moral ini ditekankan pada ketidaksesuaian program dengan prinsip pendidikan inklusif dan hak anak. Kritik moral ini diarahkan untuk pemerintah daerah yang dinilai gagal dalam melindungi kepentingan anak, bahkan sampai harus dipersoalkan ke Komnas HAM.

Treatment Recommendations, solusi yang diangkat dari pemberitaan ini adalah sangat dibutuhkan adanya evaluasi kebijakan dan keikutsertaan lembaga kewenangan yang seharusnya seperti Komnas HAM. Disarankan untuk mengarah pada pengajaran yang lebih efisien dan kemanusiaan seperti bimbingan psikologis, pendidikan karakteristik di sekolah, dan pendekatan berlandaskan keluarga. Maka dengan ini, kebijakan tersebut tidak lagi merujuk kepada tindakan koersif yang menciptakan pelanggaran HAM.

Analisis Media Online Suara Pro-Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Terbaru Ada dari Kak Seto

Define Problems, Berita ini meletakkan persoalan pada kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menghasilkan konflik publik. Program tersebut bukan hanya menjadi solusi disiplin, tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi anak. Perhatian utama dari langkah Komnas HAM terkait kebijakan ini, dirumuskan sebagai permasalahan isu hak asasi, tidak hanya pengajaran untuk siswa.

Diagnose Causes, penyebab perdebatan ini ialah karena menurunnya perencanaan dengan tidak diikutsertakan ahli psikologi profesional dan terdapat juga ancaman yang dilanturkan pihak pendidik kepada siswa jika ia menolaknya, sebab itu diartikan sebagai konflik yang dianggap tidak hanya menyangkut perilaku siswa, melainkan juga sudah mencampuri urusan hak anak dan ranah pendidikan.

Make Moral Judgement, pemberitaan dari portal Kompas sudah sangat sesuai dengan menampilkan narasi dari kedua belah pihak dengan adil, seperti kritikan yang diutarakan oleh KPAI dan Tamsil mereka menilai kebijakan seperti ini malah melanggar hak anak dan berpotensi melemahkan mental anak tersebut jika tidak ada pengawasan dari para ahli. Lain hal nya dengan Kak Seto dan Natalius Pigai mereka menilai program sangat membantu dan dapat mengajarkan kedisiplinan terhadap siswa. Program ini juga bisa diharapkan meluas secara nasional jika dibuktikan berhasil.

Treatment Recommendations, yang dianjurkan dalam pemberitaan ini adalah evaluasi menyeluruh dengan melibatkan para ahli profesional dan memperkuat cara pengajaran lebih manusiawi seperti mengajak ke pesantren atau pendidikan berlandaskan keteladanan. Dengan menampakkan dua sisi pandangan sekaligus, Kompas.com memframing permasalahan ini tidak hanya sebagai kebijakan pendidikan, melainkan sebagai tempat kontroversi publik yang memantulkan perbedaan antara pendekatdisiplin militeristik dan perlindungan hak anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai analisis framing Robert N. Emant tentang pemberitaan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer untuk siswa menyimpang, yang dipublikasikan oleh portal media online Detik.com dan Kompas.com, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan perihal pemberitaan ini, yaitu pertama media online detik.com dalam pemberitaan ini lebih membahas dan menjelaskan tentang sisi dukungan publik terhadap isu kebijakan itu. Inti liputan dikelola pada aspek pembentukan disiplin dan karakter siswa, dan juga

memunculkan deskripsi bahwa program ini terbentuk karna niat baik dari pemda. Kritik yang timbul tetap dipublikasikan, namun porsinya lebih terbatas dibandingkan suara dukungan. Kedua, Kompas.com cenderung menyajikan liputan yang lebih berimbang dengan mengalokasikan ruang bagi perspektif pendukung maupun penentang.

Kompas menggarisbawahi dinamika kontroversi yang muncul, mulai dari kritisme institusi seperti KPAI dan pengaduan ke Komnas HAM, hingga endorsemen figur publik seperti Kak Seto dan Natalius Pigai. Dengan demikian, Kompas memframing isu ini bukan hanya sebagai upaya pembinaan, melainkan juga sebagai diskursus publik yang menyentuh dimensi hak anak dan legitimasi strategi pendidikan. Perbedaan framing dalam pemberitaan ini mengilustrasikan bahwa media mempunyai peran dalam membuat persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan melalui pemilihan isu dan teknik publikasikan nya.

Media online lainnya seperti ini dipercaya bisa memberitakan berita – berita yang berkualitas sesuai dengan kenyataan yang ada. Media juga bisa bertanggung jawab atas pemberitaan yang ditulis dan bisa memberikan edukasi kepada semua golongan masyarakat, tidak ada unsur merugikan dari pihak mana saja tanpa alasan apapun. Penelitian ini hanya berlandaskan analisis teks berita pada media online. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan wawancara langsung bersama pihak media sehingga informasi bisa disajikan lebih sempurna dan komprehensif.

REFERENSI

- Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Salim Faqih, R. A., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>
- Ambar. (2017). *Model Analisis Framing Robert N. Entman*. <https://pakarkomunikasi.com/model-analisis-framing-robert-n-entman>
- Fadil Muharrom, Oriza Putri Feriyanti, & Radivan, Z. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia.com dan Tempo.Co (Analisis Framing R Entman). *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2434>
- Fahruzy, K., Putra, R. I. K., Aswandi, Anwari, C. A., & Yohanes, Y. (2025). Efektivitas Program Barak Militer Solusi Untuk Mengatasi Siswa/Remaja Bermasalah Di Provinsi Jawa Barat. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 2548–6950.
- Firdausya, I. (2025). KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Korban Balita Paling Banyak. <https://mediaindonesia.com/humaniora/742857/kpai-terima-2057-aduan-sepanjang-2024-korban-balita-paling-banyak>
- H.V Ayomi. (2021). Analisis Framing Media Online tentang Pandemi Covid-19. *Jurnal Da'wah*, 4(2), 118–125.
- M. Mahbubi. (2025). PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDEKATAN MILITER: Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dalam Mengatasi Siswa Bermasalah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 55–67.
- Maharani, I. (2025, May 24). Suara Pro-Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Terbaru Ada dari Kak Seto. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/24/163000065/suara-pro-kontra-kebijakan-dedi-mulyadi-kirim-siswa-ke-barak-militer>
- Maya Citra, R. (2025, May 21). Setelah Gelombang Pertama, Akankah Program Barak Militer Siswa Dedi Mulyadi Diteruskan? *Kompas*. <https://www.kompas.com/jawa->

- barat/read/2025/05/21/160000788/setelah-gelombang-pertama-akankah-program-barak-militer-siswa-dedi?page=2
- Mohammad Fahmi Sepudin, A. R. (2025). Kontroversi Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat: Studi Pustaka atas Pendekatan Top-DowndalamReformasi Pendidikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business(RIGGS)*, 4, 6443–6448. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1643>
- Rieka, M. (2020). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENGENAI KASUS PEDOFILIA DI AKUN FACEBOOK.
- Sumaryanto, E., & Ibrahim, M. (2022). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 2–7. <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/download/392/258>
- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DALAM PEMBERITAAN PROFILDAN KEBIJAKAN MENTERI SUSI PUDJIASTUTI (Studi Pada Situs Berita Detik.com, Kompas.com danAntaranews.com periode Oktober - Desember 2014). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1), 119–138. <https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23menterisusi&src=typd>